

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran pemerintah dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tapanuli Utara adalah dengan mendukung mewujudkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu mewujudkan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, pemerintah menggunakan media. Media dapat mempermudah pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Media sebagai sarana penyampaian informasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi agar setiap informasi publik dapat diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dengan adanya media maka semakin mudah pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan.
2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah belum terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun PPID belum terbentuk, pejabat publik yang menyampaikan informasi kepada masyarakat adalah Humas. Humas yang bertugas memberikan pelayanan informasi bagi setiap pemohon informasi publik. Kendala lain yang dihadapi oleh pemerintah datang dari

masyarakat. Salah satunya adalah adanya kebiasaan masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan jaringan informal atau kedekatan dengan pejabat publik, tidak melalui jalur formal yang diisyaratkan dalam Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik.

3. Di Kabupaten Tapanuli Utara tidak ada birokrasi yang tidak transparan. Bupati Tapanuli Utara memerintahkan kepada seluruh birokrasi untuk tetap transparan kepada masyarakat. Setiap rencana pembuatan kebijakan publik dan program kebijakan publik diinformasikan kepada masyarakat supaya masyarakat aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik. Setiap keputusan kebijakan publik juga harus dilaporkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu kebijakan publik yang akan dikerjakan oleh pemerintah dan alasan pengambilan suatu keputusan publik.

#### **B. Saran**

Pemerintah Tapanuli Utara sebagai penyelenggara negara diharapkan dapat lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan adanya keterbukaan informasi publik maka transparansi pemerintah akan terwujud. Dengan begitu maka akan terwujud pemerintahan yang baik karena salah satu syarat terwujudnyanya penyelenggara negara yang baik adalah adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah. Badan Publik harus segera membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Tapanuli Utara supaya pelayanan informasi publik dapat lebih baik lagi.